

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1975.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Madaniy, Malik, *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasrullah, Tanto Lailam, *Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Nugraharani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum : Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Republik Indonesia, Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2013.

Ridho, M. Zainor, *Pengantar Ilmu Politik*, Serang: LP2M UIN SMH Banten, 2018.

Sulisworo, Dwi, *Demokrasi*, Buku Bahan Ajar Pembelajaran Non Konvensional, 2012.

UIN Banten, Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Serang: Fakultas Syariah UIN Banten, 2020.

JURNAL, SKRIPSI & KARYA TULIS

Rahmawati, Nurlaili, “*Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang oleh Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 2, (November 2018). IAIN Tulung Agung.

Pramudya, Kelik, “*Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada yang Efektif dan Berkeadilan*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 1, (April 2015). MT&P Law Firm.

Zoelva, Hamdan “*Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, (September 2013). Mahkamah Konstitusi RI.

Wicaksono, Dian Agung, dkk. Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4 No. 1, (April 2015). Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Elcaputera, Arie, “*Kedudukan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2019). Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.

- Iin Kamila, *“Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”*, Tesis Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2019
- Nazarudin Lathif, *“Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”*, Jurnal Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2017) Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Muhhamad Zaky, *“Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Germany Federal Constitutional Court dan Implikasinya secara Global,”* Jurnal Transnasional, Vol. 11, No. 1 (Juni 2016)
- Fahrizal, Skripsi Berjudul: Analisis Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Indrasari, Rahmatullah, Skripsi Berjudul: Analisis Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019.
- Janah, Rosiatul, Skripsi Berjudul: Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013), Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Iqbal, Moch, Skripsi Berjudul: Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010), Jember: Universitas Jember, 2011.
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2020 – Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketetapan MPRS No. III/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, TLN No. 5678.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, TLN No. 5898.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 58 Tahun 2008 TLN. No. 4844.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, TLN No. 2699.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, TLN No. 4721.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, TLN No. 4437.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, TLN No. 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, TLN No. 5077.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, TLN No. 5078.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, TLN No. 5079.

WEBSITE

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.19 WIB.

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4>, diakses ada 23 Juli 2021 Pukul 20.23 WIB.

Wakid Yusuf, “Kaidah Umum 5 & 6” dalam At-Tarbiyah, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/04/kaidah-umum-5-6>, diakses pada 01 Okt. 2021, pukul 21.13 WIB.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, <https://hot.liputan6.com/read/4548260/15-pengertian-demokrasi-menurut-ahli-ketahui-hakikatnya>, diakses pada 12 Juli 2021, pukul 20.30 WIB.

Topan Yuniarto, “Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia,” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>, diakses pada 18 Agustus 2021, pukul 01.15 WIB.

Agus Sahbani, “Inilah Kisaran Honorarium Pengacara Sengketa Pilkada”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a83fd32a38b/inilah-kisaran-honorarium-pengacara-sengketa-pilkada>, diakses pada 01 Oktober 2021 Pukul 03.49 WIB.